



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

**SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

**Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 DESEMBER 2019**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 1 Pebruari 2020
**Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

Roy M Siagian
NIP 197203121993031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I Laporan Realisasi Anggaran	7
II Neraca	8
III Laporan Operasional	9
IV Laporan Perubahan Ekuitas	10
V Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	44
VI Lampiran dan Daftar	45

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN MENDANAU NO. 2 KELURAHAN AIR ITAM KEC. BUKIT INTAN
TELEPON (0717) 4261477, FAXIMILE (0717) 4261477

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pangkalpinang, 1 Pebruari 2020

**Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**

Roy M Siagian

NIP 197203121993031002

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1,800,000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,800,000 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51,564,069,500 atau mencapai 78.75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp65,477,076,000.

2 NERACA

- Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp7,364,262,562 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1,645,084,295; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5,710,553,267 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp8,625,000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11,910,772 dan Rp7,352,351,790.

3 LAPORAN

• OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1,902,223 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp53,610,648,622 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-53,608,746,399, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp11,752,990 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-53,596,993,409.

4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp9,204,341,810, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-53,596,993,409 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 51,745,003,389 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp7,352,351,790.

5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

• Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
DAN TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1,800,000	-	7,312,082
JUMLAH PENDAPATAN		-	1,800,000	-	7,312,082
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	13,491,026,000	5,533,724,171	41.02	1,057,798,710
Belanja Barang	B.4	50,869,050,000	45,043,468,609	88.55	59,152,573,238
Belanja Modal	B.5	1,117,000,000	986,876,720	88.35	4,144,976,990
JUMLAH BELANJA		65,477,076,000	51,564,069,500	78.75	64,355,348,938
SURPLUS/DEFISIT		(65,477,076,000)	(51,562,269,500)		(64,348,036,856)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	184,636,112	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	1,390,781,333	2,811,886,000
Persediaan	C.3	69,666,850	-
Jumlah Aset Lancar		1,645,084,295	2,811,886,000
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	9,701,643,860	8,929,136,140
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	8,000,000	8,000,000
Aset Tetap Lainnya	C.6	862,448,114	648,079,114
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(4,861,538,707)	(3,179,868,845)
Jumlah Aset Tetap		5,710,553,267	6,405,346,409
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	27,000,000	27,000,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(18,375,000)	(11,625,000)
Jumlah Aset Lainnya		8,625,000	15,375,000
JUMLAH ASET		7,364,262,562	9,232,607,409
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	11,910,772	28,265,599
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11,910,772	28,265,599
JUMLAH KEWAJIBAN		11,910,772	28,265,599
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	7,352,351,790	9,204,341,810
JUMLAH EKUTAS		7,352,351,790	9,204,341,810
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7,364,262,562	9,232,607,409

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN TAHUN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1,902,223	1,788,464
Jumlah Pendapatan		1,902,223	1,788,464
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	5,533,724,171	1,057,798,710
Beban Persediaan	D.3	267,259,150	68,778,500
Beban Barang dan Jasa	D.4	29,096,515,253	37,807,689,136
Beban Pemeliharaan	D.5	829,381,402	638,088,871
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16,195,348,784	18,699,076,698
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1,688,419,862	1,305,842,795
Jumlah Beban		53,610,648,622	59,577,274,710
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(53,608,746,399)	(59,575,486,246)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	11,752,990	(6,000)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		11,752,990	(6,000)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(53,596,993,409)	(59,575,492,246)
Pos Luar Biasa	D.9		
SURPLUS/DEFISIT - LO		(53,596,993,409)	(59,575,492,246)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	9,204,341,810	7,962,861,737
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(53,596,993,409)	(59,575,492,246)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(2,018,300,204)
Koreksi Lain-Lain	E.4	-	(2,018,300,204)
Jumlah		-	(2,018,300,204)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	51,745,003,389	62,835,272,523
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,851,990,020)	1,241,480,073
EKUITAS AKHIR	E.6	7,352,351,790	9,204,341,810

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Dasar Hukum
dan Profil
Entitas*

1) Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
 - a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
- b) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- c) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/Aplikasi Komputer</i>	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi 8 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2019	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	13,491,026,000	13,491,026,000
Belanja Barang	46,764,304,000	50,869,050,000
Belanja Modal	903,000,000	1,117,000,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	61,158,330,000	65,477,076,000

Realisasi

Pendapatan

Rp1.800.000,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.800.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pengembalian belanja tahun sebelumnya sebesar Rp1.800.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1,800,000	-
Jumlah	-	1,800,000	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 75,38 persen dibanding tahun sebelumnya hal ini disebabkan Pada Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari dokumen-dokumen pelelangan dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2019 and 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,800,000	7,312,082	(75.38)
Jumlah	1,800,000	7,312,082	(75.38)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A.2018	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,800,000	-	-
Pendapatan Penjualan Dokumen- dokumen Pelelangan	-	1,650,000	(100.00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	5,662,082	(100.00)
	-	-	-
Jumlah	1,800,000	7,312,082	(75.38)

B.2 Belanja

Realisasi

Belanja

Rp51.564.069.50

0

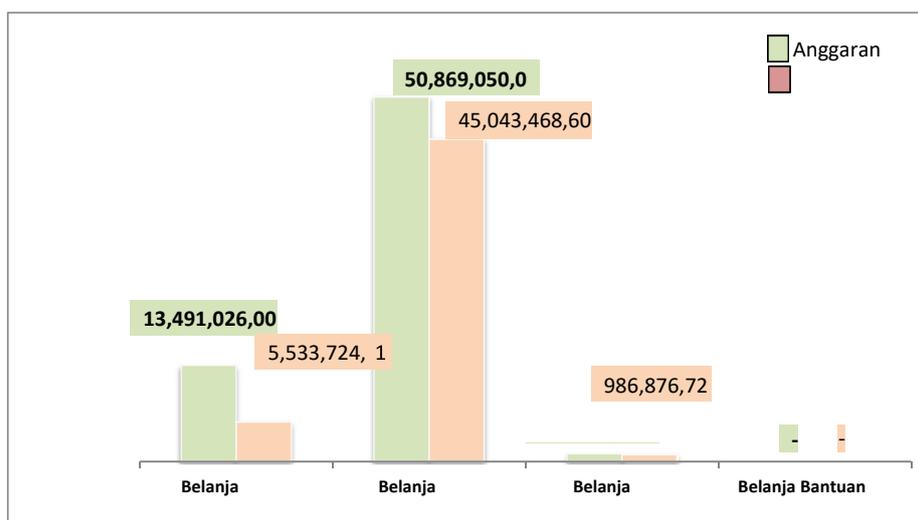
Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp51.564.069.500 atau 78,75 % dari anggaran belanja sebesar Rp.65.477.076.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desember 2019

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	13,491,026,000	5,533,724,171	41.02
Belanja Barang	50,869,050,000	45,043,468,609	88.55
Belanja Modal	1,117,000,000	986,876,720	88.35
Jumlah	65,477,076,000	51,564,069,500	78.75

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2019



Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 19,88% hal ini disebabkan terjadi penurunan Realiasasi Belanja Operasional dan Realiasasi Belanja Modal di tahun 2019. Penurunan paling signifikan adalah belanja modal dimana pada tahun 2018 dilakukan belanja modal terkait dengan proses kab/kota menjadi satuan kerja. Berikut rincian realisasi belanja TA 2019 dan TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Belanja Pegawai	5,533,724,171	1,057,798,710	423.14
Belanja Barang	45,043,468,609	59,152,573,238	(23.85)
Belanja Modal	98,876,720	4,144,976,990	(76.19)
Jumlah	51,564,069,500	64,355,348,938	(19.88)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp5.533.724.171

,-

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.533.724.171 dan Rp1.057.798.710. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 423,14 % dari TA 2018. Hal ini disebabkan Karena adanya Kenaikan gaji pokok PNS, adanya kenaikan uang kehormatan komisioner dan penambahan pegawai sebanyak 6 orang CPNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A.2018	%
Belanja Gaji Pokok PNS	173,197,040	35,476,000	388.21
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,875	700	453.57
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,944,760	3,294,200	19.75
Belanja Tunj. Anak PNS	788,952	557,480	41.52
Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	29,880,000	34.94
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	6,517,800	2,462,280	164.71
Belanja Uang Makan PNS	171,220,550	8,639,000	1,881.95
Belanja Tunjangan Umum PNS	14,745,000	2,405,000	513.10
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Neg	4,729,235,600	852,260,000	454.91
Belanja Uang Lembur	46,478,800	24,225,000	91.86
Jumlah Belanja kotor	5,533,812,027	1,057,798,710	423.14
Pengembalian Belanja Pegawai	87,856	-	-
Jumlah Belanja	5,533,724,171	1,057,798,710	423.14

Belanja Barang

Rp45.043.468.609

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp45.043.468.609 dan Rp59.152.573.238. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 23,85% dari Realisasi TA 2018 hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi Belanja Barang Operasional di tahun 2019.

Perbandingan Belanja Barang

31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Belanja Barang Operasional	14,807,850,977	20,570,310,255	(28.01)
Belanja Barang Non Operasional	7,330,086,850	8,802,814,136	(16.73)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	257,537,660	68,784,500	274.41
Belanja Jasa	5,654,817,140	10,337,198,778	(45.30)
Belanja Pemeliharaan	829,381,402	638,088,871	29.98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16,298,310,095	18,768,893,998	(13.16)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	45,177,984,124	59,186,090,538	(23.67)
Pengembalian Belanja	134,515,515	33,517,300	301.33
Jumlah Belanja	45,043,468,609	59,152,573,238	(23.85)

Belanja Modal

Rp.986.876.720

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp986.876.720 dan Rp4.144.976.990. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 76,19% dibandingkan TA 2018 hal ini disebabkan oleh penurunan yang signifikan dari realisasi belanja peralatan dan mesin karena terjadi penurunan Anggaran Peralatan dan Mesin di Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	772,507,720	3,946,714,990	(80.43)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	214,369,000	198,262,000	8.12
Jumlah Belanja Kotor	986,876,720	4,144,976,990	(76.19)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	986,876,720	4,144,976,990	(76.19)

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp772.507.720*

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp772,507,720 dan Rp3,946,714,990, mengalami penurunan sebesar 80.43 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin lebih rendah dibanding periode sebelumnya karena ditahun 2018 terdapat alokasi anggaran belanja Modal Peralatan dan mesin untuk mendukung persiapan kabupaten/kota menjadi Satuan Kerja.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahunan TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	772,507,720	3,946,714,990	(80.43)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	772,507,720	3,946,714,990	(80.43)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	772,507,720	3,946,714,990	(80.43)

*Belanja Modal
Lainnya
Rp214.369.000*

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 214,369,000 dan Rp 198,262,000, mengalami kenaikan sebesar 8,12 % dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal asset tetap renovasi untuk perbaikan partisi gedung arsip, gedung ruang kerja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2019
dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Lainnya	198,369,000	198,262,000	0.05
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap	16,000,000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	214,369,000	198,262,000	8.12
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	214,369,000	198,262,000	8.12

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp184.63611
2*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp184.636.112 dan Rp 0. Kas Lainnya dan Setara sebesar Rp 184.636.112,- terdiri dari Jasa Giro Bank Sebesar Rp 1.902.223,- dan Kas Lainnya dari Hibah (4 Kabupaten) sebesar Rp 182.733.889,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak

tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Jasa Giro Bank	1,902,223.00	-
Kas Lainnya dari Hibah	182,733,889.00	-
Jumlah	184,636,112	-

*Belanja
Dibayar
Dimuka
(prepaid)
Rp1.390.781.3
33*

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 1.390.781.333,- untuk sewa kendaraan dan Rp2.811.886.000 . Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) terlampir.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1,390,781,333.00	2,811,886,000.00
Jumlah	1,390,781,333	2,811,886,000

*Persediaan
Rp.69.666.850*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp69,666,850 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan TA 2019 dan 2018

Jenis	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018
Barang Konsumsi	69,666,850	-
Jumlah	69,666,850	-

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik dan merupakan Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019

*Peralatan
dan Mesin
Rp9.701.643.
860*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp9.701.643.860 dan Rp8.929.136.140. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019	8,929,136,140
Mutasi tambah:	
Pembelian	772,507,720
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2019	9,701,643,860
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(4,855,672,040)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	4,845,971,820

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. Alat Kantor (3.05.01) sebesar Rp 115.355.000,-
- b. Alat Rumah Tangga (3.05.02) sebesar Rp 276.070.720,-
- c. Alat Studio (3.06.01) sebesar Rp 125.968.000,-
- d. Komputer Unit (3.10.01) sebesar Rp 188.934.000,-
- e. Peralatan Komputer (3.10.02) sebesar Rp 66.180.000,-

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan Rp
8.000.000,-*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.8.000.000 dan Rp.8.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019	8,000,000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	8,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2019	(5,866,667)
Nilai Buku per 31 Des 2019	2,133,333

C.6 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp862.448.1
14,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.862.448.114 dan Rp.648.079.114. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019	648,079,114
Mutasi tambah:	
Pembelian	214,369,000
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2019	862,448,114
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	862,448,114

Mutasi tambah/kurang:

Terdapat mutasi tambahan sebesar Rp 214.369.000 disebabkan adanya renovasi gedung arsip, renovasi ruang kerja pegawai dan belanja modal perencanaan dan pengwasan aset tetap lainnya/aset lainnya.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp4.861.538.
707,-*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp4.861.538.707 dan Rp3.179.868.845. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan Tahun 2019

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9,701,643,860	(4,855,672,040)	4,845,971,820
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,000,000	(5,866,667)	2,133,333
4	Aset Tetap Lainnya	862,448,114	-	862,448,114
Akumulasi Penyusutan		10,572,091,974	(4,861,538,707)	5,710,553,267

*Aset Tak
Berwujud
Rp27.000.00
0,-*

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp27.000.000 dan Rp27.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2019	27,000,000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2019	27,000,000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(18,375,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	8,625,000

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 18.375.000,-*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp18.375.000 dan Rp11.625.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	27,000,000	(18,375,000)	8,625,000
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	27,000,000	(18,375,000)	8,625,000

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 11.910.772,-*

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.910.772 dan Rp28.265.599. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	11,910,772	28,265,599
Total	11,910,772	28,265,599

*Ekuitas
Rp7.352.351.790*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.352.351.790. dan Rp9.204.341.810. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp1.902.223,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.902.223 dan Rp1.788.464. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan TA 2019 dan
2018*

URAIAN	2019	2018	%
Pendapatan Penjualan Dokumen-	-	1,650,000.00	(100)
Pendapatan Jasa Lembaga	1,902,223	138,464.00	1,274
Jumlah	1,902,223.00	1,788,464.00	-

Beban Pegawai

Rp5.533.724.171

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.533.724.171 dan Rp1.057.798.710.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar 423,14 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Pada Tahun 2019 realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dikarenakan adanya kenaikan gaji pokok pns di tahun 2019, bertambahnya pegawai yaitu 6 orang cpns dan kenaikan uang kehormatan untuk komisioner. Rincian Beban Pegawai Tahunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Beban Gaji Pokok PNS	173,197,040	35,476,000	388.21
Beban Pembulatan Gaji PNS	3,819	700	445.57
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,944,760	3,294,200	19.75
Beban Tunj. Anak PNS	788,952	557,480	41.52
Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	29,880,000	34.94
Beban Tunj. Beras PNS	6,517,800	2,462,280	164.71
Beban Uang Makan PNS	171,220,550	8,639,000	1,881.95
Beban Tunjangan Umum PNS	14,745,000	2,405,000	513.10
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,729,219,800	852,260,000	454.90
Beban Uang Lembur	46,406,800	24,225,000	91.57
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	347,359,650	98,599,050	252.30
Jumlah	5,533,724,171	1,057,798,710	423.14

*Beban Persediaan
Rp267.259.150,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp267.259.150 dan Rp68.778.500

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 288,58 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Kenaikan Beban Persediaan pada tahun 2019 disebabkan bertambahnya staf sebanyak 14 orang dan secara kelembagaan bawaslu provinsi kep. Bangka Belitung banyak melakukan kegiatan terkait pengawasan pemilu serentak. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Beban Persediaan konsumsi	267,259,150	68,778,500	288.58
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	267,259,150.00	68,778,500	288.58

*Beban Barang dan
Jasa
Rp29.096.515.253*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29,096,515,253 dan Rp37.807.689.136. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 22,86 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh adanya penurunan beban keperluan perkantoran dan penurunan beban sewa penurunan beban sewa ini disebabkan karena pada tahun 2019 hanya ada realisasi sewa kendaraan untuk kabupaten/kota. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Beban Keperluan Perkantoran	13,398,090,073	19,415,393,105	(30.99)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	651,790,000	820,590,000	(20.57)
Beban Barang Operasional Lainnya	740,962,200	333,427,150	122.23
Beban Bahan	5,738,622,200	6,937,214,636	(16.27)
Beban Honor Output Kegiatan	1,231,705,000	1,779,092,000	(30.77)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	277,778,800	86,507,500	221.10
Beban Langganan Listrik	264,257,028	270,798,065	(2.42)
Beban Langganan Telepon	64,629,152	202,800,773	(68.13)
Beban Langganan Air	8,860,564	9,842,999	(9.98)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	11,994,408	(100.00)
Beban Jasa Pos dan Giro	2,750,250	1,767,700	55.58
Beban Sewa	4,643,690,967	5,008,486,600	(7.28)
Beban Jasa Profesi	1,698,181,000	2,049,260,000	(17.13)
Beban Jasa Lainnya	375.198.019	850.074.200	(55.86)
Jumlah	29,096,515,253	37,807,689,136	(23.04)

*Beban
Pemeliharaan
Rp829.381.402,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp829.381.402 dan Rp638.088.871.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 29,98 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Kenaikan Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dikarenakan ada kenaikan beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Pemeliharaan peralatan dan mesin di tahun 2019.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA.2019	REALISASI T.A.2018	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	89,338,500	67,775,000	31.82
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	740,042,902	568,588,871	30.15
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1,725,000	(100.00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Jumlah	829,381,402	638,088,871	29.98

D.6 Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp16.195.348.784,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16,195,348,784 dan Rp18,699,076,698.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13.39 persen disebabkan oleh Penurunan Beban perjalanan dinas di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan oleh penurunan beban perjalanan dinas dalam kota dan penurunan beban perjalanan dinas paket meeting luar. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Beban Perjalanan Biasa	5,477,711,884	5,254,546,597	4.25
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,491,651,700	3,752,333,500	(33.60)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,206,754,200	7,407,059,100	(2.70)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,019,231,000	2,285,137,501	(55.40)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	16,195,348,784	18,699,076,698	(13.39)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.688.419.862,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.688.419.862 dan Rp1.305.842.795.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,681,136,528	1,298,559,461	29.46
Beban Penyusutan Jaringan	533,334	533,334	-
Beban Amortisasi Software	6,750,000	6,750,000	-
Jumah Penyusutan	1,688,419,862	1,305,842,795	29.30
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1,688,419,862	1,305,842,795	29.30

*Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp11.752.990,-*

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.752.990 dan Rp-6.000.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,800,000	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	14,630,100	24,000.00	60,858.75
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(4,677,110)	(30,000.00)	15,490.37
Jumlah	11,752,990.00	(6,000)	(195,983.17)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp9.204.341.810,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.9.204.341.810,00 dan Rp.7.962.861.737,-

Surplus (Defisit)

LORp53.596.993.409,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.-53.596.993.409,- dan Rp.-59.575.492.246,- Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,-

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-2,018,300,204 yaitu sebagai berikut.

Transaksi Antar

Entitas

Rp51.745.003.389,-

-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.51.745.003.389 dan Rp.62.835.272.523. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2019

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	50,088,366,389
Diterima dari Entitas Lain	(1,800,000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	1,658,437,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	51,745,003,389

*DDEL/DKEL**Rp50.088.366.389/**Rp 1.800.000,-***E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DKEL sebesar Rp 50.088.366.389,- sedangkan DDEL sebesar Rp 1.800.000

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 1.658.437.000 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2019

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	Hibang Uang	575,916,000
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Hibang Uang	544,200,000
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Hibang Uang	300,000,000
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Hibang Uang	238,321,000
Total Pengesahan		1,658,437,000.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		1,658,437,000

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp7.282.684.940,-

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.7.282.684.940,00 dan Rp.9.204.341.810,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 0538/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2017 Tentang Perubahan Ketujuh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 01 Juni 2018, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pengelola Keuangan sebelum perubahan :

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Ari Susanto

Pejabat Pembuat Komitmen : Yaumil Ikrom, S.Ip

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Siti Jamilah, SE.M.M

Bendahara : Febriyanti, SE

Pejabat Pengelola Keuangan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pengelola Keuangan sesudah perubahan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Roy M Siagian, S.Sos.MSi

Pejabat Pembuat Komitmen : Yaumil Ikrom, S.Ip

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Siti Jamilah, SE.M.M

Bendahara : Fitri Widiastuti, SE